



UNIVERSITAS PERTAHANAN RI

**ASERTIVITAS CINA DAN POLITIK BIROKRASI DI DALAM
KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP
KONFLIK LAUT CINA SELATAN**

**GAFFAR MU'AQAFFI
NIM. 120200302012**

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**BOGOR
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Gaffar Mu'aqaffi
NIM : 120200302012
Program Studi : Keamanan Maritim
Fakultas : Fakultas Keamanan Nasional
Judul Tesis : Asertivitas Cina dan Politik Birokrasi di dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Laut Cina Selatan

Pembimbing I,



Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian,
S.T., M.Sc., DESD. ASEAN Eng.
Laksamana Madya TNI

Tanggal: 27 Februari 2022

Pembimbing II,



Ir. Bayu Asih Yulianto, M. Si

Tanggal: 26 Februari 2022

Mengetahui,



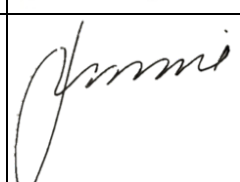
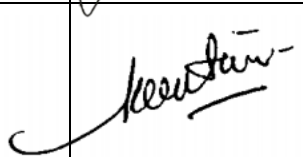

Dekan Fakultas Keamanan Nasional



Dr. Syamsunasir, S.Sos. M.M., C.Fr.A.
Marsekal Muda TNI

Tanggal: 1 Maret 2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

<p>Nama : Gaffar Mu'aqaffi NIM : 120200302012 Program Studi : Keamanan Maritim Fakultas : Fakultas Keamanan Nasional Judul Tesis : Agresivitas Cina dan Politik Birokrasi di dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Laut Cina Selatan</p>			
No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I: Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., ASEAN Eng. Laksamana Madya TNI		4 Maret 2022
2.	Pembimbing II: Ir. Bayu Asih Yulianto, M. Si		3 Maret 2022
3.	<i>Reviewer I:</i> Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Moch. Jurianto, S.E., M.M		3 Maret 2022
4.	<i>Reviewer II:</i> Laksda TNI (Purn.) Ir. Budiman Djoko Said, M.M.		3 Maret 2022
5.	<i>Reviewer III:</i> Kolonel Laut (E) Dr. Lukman Yudho Prakoso, S.IP., M.AP.		3 Maret 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, sub bab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Jakarta, Februari 2022



Gaffar Mu'aqaffi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis dengan judul: **“Asertivitas Cina dan Politik Birokrasi di dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Laut Cina Selatan”** dapat diselesaikan. Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

Menuntut ilmu di Universitas Pertahanan RI dan Ilmu Keamanan Maritim membuka pengetahuan dan pemikiran Penulis. Penulis belajar banyak arti keteguhan, kesabaran, dan konsistensi. Semua hal yang dipelajari telah Penulis tuangkan ke dalam tesis.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

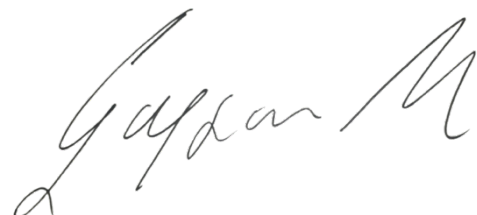
1. Bapak Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Pertahanan dan Pembimbing 1 yang selalu memberikan bimbingan, arahan, maupun petunjuk dalam penyusunan tesis ini dari awal hingga selesai
2. Bapak Marsekal Muda TNI Dr. Syamsunasir, S.Sos., MM., C.Fr.A selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional
3. Bapak Ir. Bayu Asih Yulianto, M.Si., sebagai Pembimbing 2 saya yang senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Moch. Juriyanto, S.E., M.M., selaku Reviewer I
5. Bapak Laksamana Muda TNI (Purn) Ir. Budiman Djoko Said, M.M., selaku Reviewer II

6. Bapak Kolonel Laut (E) Dr. Lukman Yudho Prakoso, S.IP., M.AP., selaku Reviewer III
7. Bapak Kolonel Laut (KH) Dr. Panji Suwarno, S.E., M.Si., CIQnR., selaku Sekretaris Program Studi Keamanan Maritim.
8. Staf Prodi Keamanan Maritim yang sudah sangat mebangtu untuk proses belajar hingga lulus.
9. Keluarga penulis, Bapak Dalih Usman, Ibu Ida Zahara, dan Amru Khaifa Wafa. Mereka memberikan semangat bagi Penulis untuk tetap tahan banting dan sabar untuk menuntut ilmu
10. Tujuh belas Mahasiswa Prodi Keamanan Maritim Cohort VIII yang luar biasa dan sangat membanggakan.
11. Dan kepada seluruh rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu Keamanan Maritim dan bermanfaat bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan luar negeri terhadap konflik Laut Cina Selatan.

Jakarta, 26 Februari 2022



Gaffar Mu'aqaffi

ABSTRAK

ASERTIVITAS CINA DAN POLITIK BIROKRASI DI DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP KONFLIK LAUT CINA SELATAN

GAFFAR MU'AQAFFI

Peningkatan asertivitas Cina di dalam konflik Laut Cina Selatan telah menjadi perbincangan akademisi maupun praktisi pada tahun 2010-an. Cina mulai menggunakan pendekatan yang berbeda di dalam konflik Laut Cina Selatan yang belum pernah dilakukannya sebelumnya, bahkan menggunakan cara-cara kekerasan. Meskipun Cina semakin asertif di Laut Cina Selatan, di dalam tubuh pemerintahan Indonesia juga terjadi politik antar birokrat dalam merespon konflik Laut Cina Selatan. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh asertivitas Cina dan politik birokrasi di dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Laut Cina Selatan. Untuk menjelaskan itu, peneliti menganalisis dua administrasi: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif *explanatory* yang dilengkapi dengan *Soft System Methodology*. Penelitian ini mengaplikasikan beberapa teori: pertahanan negara, keamanan maritim, hubungan internasional (Realisme Neoklasik), diplomasi, kebijakan publik, perbandingan kebijakan luar negeri, dan dibantu *Software NVivo* untuk melakukan pengolahan data. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa asertivitas Cina dan politik birokrasi memiliki pengaruh dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Pengaruh ini terjadi baik pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun pada masa Presiden Joko Widodo. Untuk itu, dalam mengantisipasi asertivitas Cina, Indonesia perlu melakukan strategi *hedging* dan *engagement* dengan Cina secara bilateral maupun multilateral. Indonesia juga perlu untuk melakukan intensifikasi hubungan bilateral dengan Amerika Serikat dan juga ASEAN. Dengan pendekatan yang terukur, *internal balancing* juga diperlukan agar Indonesia lebih berani dalam melakukan kebijakan-kebijakan unilateral. Dalam konteks politik birokrasi, Indonesia memiliki dua pilihan; pertama, maksimalisasi peran kementerian koordinator yang bisa berlaku seperti *controller* dalam manajemen politik birokrasi; kedua, pembentukan *National Security Council (NSC)*.

Kata kunci: Asertivitas Cina, Politik Birokrasi, Indonesia, Kebijakan Luar Negeri, Konflik Laut Cina Selatan

ABSTRACT

CHINA'S ASSERTIVENESS AND BUREAUCRATIC POLITICS IN INDONESIA'S FOREIGN POLICY ON THE SOUTH CHINA SEA CONFLICT

GAFFAR MU'AQAFFI

China's increasing assertiveness in the South China Sea conflict has become a topic of discussion for both academics and practitioners in the 2010s. China began to use a different approach in the South China Sea conflict that it had never done before, even using violent means. Even though China is increasingly assertive in the South China Sea, within the Indonesian government there is also politics between bureaucrats in responding to the South China Sea conflict. This study seeks to explain the influence of Chinese assertiveness and bureaucratic politics in Indonesia's foreign policy on the South China Sea conflict. To explain this, the researcher analyzes two administrations: President Susilo Bambang Yudhoyono and President Joko Widodo. This study uses an explanatory qualitative methodology equipped with a Soft System Methodology. This study applies several theories: national defense, maritime security, international relations (Neoclassical Realism), diplomacy, public policy, foreign policy comparisons, and assisted by NVivo Software to perform data processing. Based on the results of the study, it is known that Chinese assertiveness and bureaucratic politics have an influence on Indonesia's foreign policy. This influence occurred both during President Susilo Bambang Yudhoyono and during President Joko Widodo. Therefore, in anticipating China's assertiveness, Indonesia needs to carry out a hedging strategy and engagement with China bilaterally and multilaterally. Indonesia also needs to intensify bilateral relations with the United States and also ASEAN. With a relatively measured approach, internal balancing is also needed so that Indonesia is more courageous in carrying out unilateral policies. In the context of bureaucratic politics, Indonesia has two choices; first, the formation of the National Security Council (NSC); second, maximizing the role of the coordinating ministry that can act like a controller in bureaucratic political management.

Keywords: China's Assertiveness, Bureaucratic Politics, Indonesia, Foreign Policy, The South China Sea Conflict

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB 1_PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Asertivitas Cina.....	6
1.1.2. Politik Birokrasi	11
1.2. Fokus dan Subfokus	18
1.2.1. Fokus Penelitian	18
1.2.2. Subfokus Penelitian	18
1.3. Rumusan Masalah.....	19
1.4. Tujuan Penelitian	19
1.5. Manfaat Penelitian.....	20
BAB 2_TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1. Landasan Teori.....	22
2.1.1. Teori Pertahanan Negara	22

2.1.2. Teori Keamanan Maritim	23
2.1.3. Teori Kawasan	25
2.1.4. Teori Hubungan Internasional	26
2.1.5. Teori Diplomasi.....	28
2.1.6. Teori Kebijakan Publik	30
2.1.7. Teori Perbandingan Kebijakan Luar Negeri.....	32
2.1.8. Teori Strategi Hedging	33
2.2. Penelitian Terdahulu.....	34
2.2.1. Syailendra (2017)	34
2.2.2. Lim, G, Li, C, Syailendra, E.A (2021).....	35
2.2.3. Laksmana (2016).....	36
2.2.4. Laksmana (2018).....	36
2.2.5. Darmawan (2018).....	37
2.3. Kerangka Pemikiran	42
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	43
3.1. Metode dan Desain Penelitian.....	43
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
3.2.1. Tempat Penelitian	44
3.2.2. Waktu Penelitian	44
3.3. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
3.3.1. Subjek Penelitian	46
3.3.2. Objek Penelitian.....	47
3.4. Teknik Pengumpulan Data	47
3.4.1. Wawancara	48
3.4.2. Dokumentasi.....	48
3.5. Pemeriksaan Keabsahan Data	48
3.6. Teknik Analisis Data	49

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
4.1.1. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Laut Cina Selatan.....	51
4.1.2. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Laut Cina Selatan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	54
4.1.3. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Laut Cina Selatan pada masa Presiden Joko Widodo	59
4.1.4. Gambaran Umum Narasumber	65
4.2. Hasil Pengumpulan Data.....	67
4.2.1. Pengaruh Asertivitas Cina pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Laut Cina Selatan.....	71
4.2.2. Pengaruh Politik Birokrasi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Laut Cina Selatan.....	76
4.3. Hasil Pengolahan Data.....	82
4.4. Hasil Analisis Data.....	90
4.4.1. Asertivitas Cina	90
4.4.2. Politik Birokrasi di Indonesia	110
4.4.3. Pengaruh Asertivitas Cina dan Politik Birokrasi di dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Laut Cina Selatan pada Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	117
4.4.4. Pengaruh Asertivitas Cina dan Politik Birokrasi di dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Laut Cina Selatan pada Masa Presiden Joko Widodo	130
4.4.5. Analisis Satu (Intervensi).....	156
4.4.6. Analisis Dua (Sosial)	157
4.4.7. Analisis Tiga (Politik)	159
4.4.8. Rich Picture	160

4.5. Interpretasi Data	162
4.6. Pembahasan	184
4.6.5. Kebijakan Luar Negeri untuk Mengantisipasi Asertivitas Cina	184
4.6.6. Kebijakan Luar Negeri Berbasis Bureaucratic Consensus- seeking	204
BAB 5_KESIMPULAN DAN SARAN	210
5.1. Kesimpulan.....	210
5.2. Saran.....	212
DAFTAR PUSTAKA.....	216
GLOSARIUM.....	231
LAMPIRAN.....	232

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Maritime Security Matrix	24
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	42
Gambar 3.1. Langkah-langkah Soft System Methodology	50
Gambar 4..1. Gambar Hasil Pengolahan NVIVO Pertanyaan Penelitian 1 dan 2 (RQ-1 dan RQ-2).....	84
Gambar 4.2. Hasil Pengolahan NVivo Pertanyaan Penelitian 1 (RD-1)...	85
Gambar 4.3. Hasil Pengolahan NVivo Pertanyaan Penelitian 2 (RD-2)...	86
Gambar 4.4. Lokasi Eksplorasi Minyak dan Gas Cina di Laut Cina Selatan	136
Gambar 4.5. Pembangunan Fasilitas Militer di Kepulauan Spratly tahun 2015	138
Gambar 4.6. Pembangunan Fasilitas Militer di Kepulauan Spratly tahun 2016	139
Gambar 4.7. Rich Picture	161
Gambar 4.8. Model Konseptual dan Aktivitas dari RD-1	170
Gambar 4.9. Model Konseptual dan Aktivitas dari RD-2.....	171

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pernyataan Klaim Cina atas Laut Cina Selatan	9
Grafik 1.2 Asertivitas Cina di Laut Cina Selatan	10
Grafik 4.1. Keterlibatan Indonesia dalam Diplomasi Multilateral Bidang Pertahanan (2009-2014).....	57
Grafik 4.2. Pelanggaran Cina di Laut Natuna Utara.....	60
Grafik 4.3. Keterlibatan Indonesia dalam Diplomasi Multilateral Bidang Pertahanan (2015-2021).....	64
Grafik 4.4. Frekuensi Penggunaan Kata “Cina” dan “Asertivitas” dalam media-media massa di Amerika Serikat.....	91
Grafik 4.5. Perbandingan Pertumbuhan PDB Tahunan Cina-Amerika Serikat 1974-2020.....	96
Grafik 4.6. Volume Ekspor dan Impor yang Melalui Pelabuhan Cina 2010- 2019 (dalam milyar ton)	100
Grafik 4.7. Impor Crude Oil Cina melalui Laut Cina Selatan.....	100
Grafik 4.8. Pertumbuhan Anggaran Militer Cina 1989-2019 (Milyar Yuan)	104
Grafik 4.9. Jumlah Kapal Permukaan PLAN 2005-2019.....	105
Grafik 4.10. Tren Penyebutan “China” dan “Assertive” 2009-2021	108
Grafik 4.11. Perdagangan Negara-negara di Sekitar Laut Cina Selatan.....	120
Grafik 4.12. Perkembangan Maritime Militia Cina.....	140
Grafik 4.13. Kegiatan Operasi Bakamla 2015-2019.....	146
Grafik 4.14. Belanja Militer Indonesia 2012-2020 (Juta Dollar).....	147
Grafik 4.15. Perkembangan Kekuatan Angkatan Laut Indonesia 2009- 2021	148
Grafik 4.16. Foreign Military Financing Program ke Indonesia (dalam ribu USD)	195
Grafik 4.17. IMET/Military Assistance Service dari Amerika Serikat kepada Indonesia (dalam ribu USD).....	196
Grafik 4.18. Realisasi Minimum Essential Force (MEF).....	201

Grafik 4.19. Realisasi Investasi di Natuna	203
---	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perjalanan Peta Nine-Dashed Line	8
Tabel 1.2 Respons Birokrat terhadap Penangkapan Kapal Han Tan Cou 19038 pada Juni 2016	15
Tabel 1.3 Respons Birokrat terkait Pergantian Nama Laut Natuna Utara	16
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1. Waktu Penelitian.....	45
Tabel 3.2 Subjek Penelitian.....	46
Tabel 4.1. Gambaran Umum Narasumber	65
Tabel 4.2. Tabulasi Wawancara Narasumber	68
Tabel 4.3. Perbandingan Asertivitas Cina pada Administrasi Presiden Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.....	152
Tabel 4.4. Perbandingan Politik Birokrasi pada Administrasi Presiden Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.....	153
Tabel 4.5. Pengaruh Asertivitas Cina dan Politik Birokrasi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Laut Cina Selatan	155
Tabel 4.6. Root Definitions Penelitian.....	163
Tabel 4.7. RD-1: Analisis CATWOE	163
Tabel 4.8. RD-1: Analisis 3E.....	165
Tabel 4.9. RD-2: Analisis CATWOE	165
Tabel 4.10. RD-2: Analisis 3E.....	166
Tabel 4.11. Model Konseptual dan Aktivitas dari RD-1	167
Tabel 4.12. Model Konseptual dan Aktivitas dari RD-2	168
Tabel 4.13. Perbandingan Model Konseptual RD-1	174
Tabel 4.14. Perbandingan Model Konseptual RD-2	178

DAFTAR SINGKATAN

ACFTA	ASEAN-China Free Trade Area
ADMM	ASEAN Defense Ministerial Meeting
AMM	ASEAN Ministerial Meeting
AOIP	ASEAN Outlook on the Indo-Pacific
ARF	ASEAN Regional Forum
ASEAN	Association of South East Asian Nations
Bakamla	Badan Keamanan Laut
BRI	Belt and Road Initiative
CoC	Code of Conduct
DoC	Declaration of Conduct
DoD	Department of Defense
FONOP	Freedom of Navigation Operation
ITLOS	International Tribunal Law of the Sea
IUU Fishing	Illegal, Unreported and Unregulated Fishing
Kogabwilhan	Komando Gabungan Wilayah Pertahanan
OBOR	One Belt One Road
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKC	Partai Komunis Cina
PLA	The People's Liberation Army
PLAAF	The People's Liberation Army Navy
PLAN	The People's Liberation Army Air Force
PMD	Poros Maritim Dunia
SIPRI	Stockholm International Peace Research Institute
TNI AD	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
UNCLOS	United Nations Convention on the Law of the Sea

ZEE

Zona Ekonomi Eksklusif